



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 126/PMK.07/2019

TENTANG

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:
 - a. pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah;
 - b. penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; dan/atau
 - c. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
 - b. Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.
- (3) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENYUSUNAN PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
 - b. tahap II, penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi.
- (2) Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. tahap II, penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$KFD_{provinsi-i} = \text{pendapatan} - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu}]$$

Keterangan:

$KFD_{provinsi-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- (3) Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Rokok;
 - b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - c. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi;

- d. Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - e. Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
 - f. Dana Otonomi Khusus;
 - g. Dana Tambahan Infrastruktur; dan
 - h. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak termasuk Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (5) Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Bunga;
 - c. Belanja Hibah untuk Daerah Otonom Baru; dan
 - d. Belanja Bagi Hasil.

Pasal 5

- (1) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$IKFD_{provinsi-i} = \frac{KFD_{provinsi-i}}{(\sum KFD_{provinsi})/n}$$

Keterangan:

$IKFD_{provinsi-i}$ = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

$KFD_{provinsi-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

$\sum KFD_{provinsi}$ = Total Kapasitas Fiskal Daerah provinsi

n = 34 (tiga puluh empat) daerah provinsi

- (2) Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah provinsi dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$IKFD < 0,304$	sangat rendah
$0,304 \leq IKFD < 0,445$	rendah
$0,445 \leq IKFD < 0,808$	sedang
$0,808 \leq IKFD < 1,564$	tinggi
$IKFD \geq 1,564$	sangat tinggi

Pasal 6

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$KFD_{kabupaten/kota-i} = \text{pendapatan} - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu}]$$

Keterangan:

$KFD_{kabupaten/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pendapatan Asli Daerah;
 - Dana Perimbangan; dan
 - Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- (3) Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok;
 - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi;
 - Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
 - Dana Otonomi Khusus; dan
 - Dana Desa.
- (4) Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak termasuk Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (5) Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Belanja Pegawai;
 - Belanja Bunga;
 - Belanja Hibah untuk Daerah Otonom Baru;
 - Belanja Bagi Hasil; dan
 - Alokasi Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$IKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{(\sum KFD_{kabupaten/kota})/n}$$

Keterangan:

$IKFD_{kabupaten/kota-i}$ = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

$KFD_{kabupaten/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

$\sum KFD_{kabupaten/kota}$ = Total Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota

n = 508 (lima ratus delapan) daerah kabupaten/kota

- (2) Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$IKFD < 0,509$	sangat rendah
$0,509 \leq IKFD < 0,720$	rendah
$0,720 \leq IKFD < 1,089$	sedang
$1,089 \leq IKFD < 1,959$	tinggi
$IKFD \geq 1,959$	sangat tinggi

Pasal 8

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 menggunakan data APBD Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.07/2018 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1210), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 987

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian




ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126/PMK.07/2019
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

A. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH PROVINSI

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
1	Prov. Aceh	0,529	Sedang
2	Prov. Sumatera Utara	0,945	Tinggi
3	Prov. Sumatera Barat	0,455	Sedang
4	Prov. Riau	0,956	Tinggi
5	Prov. Jambi	0,350	Rendah
6	Prov. Sumatera Selatan	0,794	Sedang
7	Prov. Bengkulu	0,319	Rendah
8	Prov. Lampung	0,590	Sedang
9	Prov. DKI Jakarta	11,473	Sangat Tinggi
10	Prov. Jawa Barat	3,171	Sangat Tinggi
11	Prov. Jawa Tengah	1,948	Sangat Tinggi
12	Prov. DI Yogyakarta	0,314	Rendah
13	Prov. Jawa Timur	2,589	Sangat Tinggi
14	Prov. Kalimantan Barat	0,453	Sedang
15	Prov. Kalimantan Tengah	0,437	Rendah
16	Prov. Kalimantan Selatan	0,812	Tinggi
17	Prov. Kalimantan Timur	1,226	Tinggi
18	Prov. Sulawesi Utara	0,356	Rendah
19	Prov. Sulawesi Tengah	0,300	Sangat Rendah
20	Prov. Sulawesi Selatan	0,691	Sedang
21	Prov. Sulawesi Tenggara	0,284	Sangat Rendah
22	Prov. Bali	0,610	Sedang
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	0,395	Rendah
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	0,275	Sangat Rendah
25	Prov. Maluku	0,320	Rendah
26	Prov. Papua	0,179	Sangat Rendah
27	Prov. Maluku Utara	0,252	Sangat Rendah
28	Prov. Banten	1,135	Tinggi
29	Prov. Bangka Belitung	0,264	Sangat Rendah
30	Prov. Gorontalo	0,171	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
31	Prov. Kepulauan Riau	0,386	Rendah
32	Prov. Papua Barat	0,553	Sedang
33	Prov. Sulawesi Barat	0,189	Sangat Rendah
34	Prov. Kalimantan Utara	0,282	Sangat Rendah

B. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
1	Kab. Aceh Barat	0,553	Rendah
2	Kab. Aceh Besar	0,218	Sangat Rendah
3	Kab. Aceh Selatan	0,509	Rendah
4	Kab. Aceh Singkil	0,343	Sangat Rendah
5	Kab. Aceh Tengah	0,381	Sangat Rendah
6	Kab. Aceh Tenggara	0,222	Sangat Rendah
7	Kab. Aceh Timur	0,568	Rendah
8	Kab. Aceh Utara	0,770	Sedang
9	Kab. Bireuen	0,622	Rendah
10	Kab. Pidie	0,713	Rendah
11	Kab. Simeulue	0,322	Sangat Rendah
12	Kota Banda Aceh	0,751	Sedang
13	Kota Sabang	0,201	Sangat Rendah
14	Kota Langsa	0,429	Sangat Rendah
15	Kota Lhokseumawe	0,406	Sangat Rendah
16	Kab. Gayo Lues	0,481	Sangat Rendah
17	Kab. Aceh Barat Daya	0,347	Sangat Rendah
18	Kab. Aceh Jaya	0,248	Sangat Rendah
19	Kab. Nagan Raya	0,569	Rendah
20	Kab. Aceh Tamiang	0,688	Rendah
21	Kab. Bener Meriah	0,182	Sangat Rendah
22	Kab. Pidie Jaya	0,375	Sangat Rendah
23	Kota Subulussalam	0,381	Sangat Rendah
24	Kab. Asahan	0,920	Sedang
25	Kab. Dairi	0,478	Sangat Rendah
26	Kab. Deli Serdang	3,006	Sangat Tinggi
27	Kab. Karo	0,646	Rendah
28	Kab. Labuhanbatu	0,733	Sedang
29	Kab. Langkat	1,315	Tinggi
30	Kab. Mandailing Natal	0,780	Sedang
31	Kab. Nias	0,382	Sangat Rendah
32	Kab. Simalungun	1,165	Tinggi
33	Kab. Tapanuli Selatan	0,948	Sedang
34	Kab. Tapanuli Tengah	0,637	Rendah
35	Kab. Tapanuli Utara	0,632	Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
36	Kab. Toba Samosir	0,392	Sangat Rendah
37	Kota Binjai	0,649	Rendah
38	Kota Medan	5,369	Sangat Tinggi
39	Kota Pematang Siantar	0,642	Rendah
40	Kota Sibolga	0,553	Rendah
41	Kota Tanjung Balai	0,481	Sangat Rendah
42	Kota Tebing Tinggi	0,591	Rendah
43	Kota Padang Sidempuan	0,453	Sangat Rendah
44	Kab. Pakpak Bharat	0,343	Sangat Rendah
45	Kab. Nias Selatan	0,584	Rendah
46	Kab. Humbang Hasundutan	0,500	Sangat Rendah
47	Kab. Serdang Bedagai	0,780	Sedang
48	Kab. Samosir	0,438	Sangat Rendah
49	Kab. Batu Bara	0,629	Rendah
50	Kab. Padang Lawas	0,572	Rendah
51	Kab. Padang Lawas Utara	0,539	Rendah
52	Kab. Labuhanbatu Selatan	0,631	Rendah
53	Kab. Labuhanbatu Utara	0,545	Rendah
54	Kab. Nias Utara	0,295	Sangat Rendah
55	Kab. Nias Barat	0,367	Sangat Rendah
56	Kota Gunungsitoli	0,376	Sangat Rendah
57	Kab. Limapuluh Kota	0,690	Rendah
58	Kab. Agam	0,705	Rendah
59	Kab. Kepulauan Mentawai	0,625	Rendah
60	Kab. Padang Pariaman	0,756	Sedang
61	Kab. Pasaman	0,494	Sangat Rendah
62	Kab. Pesisir Selatan	0,796	Sedang
63	Kab. Sijunjung	0,463	Sangat Rendah
64	Kab. Solok	0,515	Rendah
65	Kab. Tanah Datar	0,704	Rendah
66	Kota Bukittinggi	0,570	Rendah
67	Kota Padang Panjang	0,495	Sangat Rendah
68	Kota Padang	2,061	Sangat Tinggi
69	Kota Payakumbuh	0,590	Rendah
70	Kota Sawahlunto	0,444	Sangat Rendah
71	Kota Solok	0,471	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
72	Kota Pariaman	0,454	Sangat Rendah
73	Kab. Pasaman Barat	0,636	Rendah
74	Kab. Dharmasraya	0,473	Sangat Rendah
75	Kab. Solok Selatan	0,527	Rendah
76	Kab. Bengkulu	4,444	Sangat Tinggi
77	Kab. Indragiri Hilir	1,326	Tinggi
78	Kab. Indragiri Hulu	1,151	Tinggi
79	Kab. Kampar	1,640	Tinggi
80	Kab. Kuantan Singingi	0,944	Sedang
81	Kab. Pelalawan	1,177	Tinggi
82	Kab. Rokan Hilir	1,624	Tinggi
83	Kab. Rokan Hulu	1,259	Tinggi
84	Kab. Siak	1,942	Tinggi
85	Kota Dumai	0,966	Sedang
86	Kota Pekanbaru	2,488	Sangat Tinggi
87	Kab. Kepulauan Meranti	0,947	Sedang
88	Kab. Batanghari	0,827	Sedang
89	Kab. Bungo	0,710	Rendah
90	Kab. Kerinci	0,629	Rendah
91	Kab. Merangin	0,682	Rendah
92	Kab. Muaro Jambi	0,720	Sedang
93	Kab. Sarolangun	0,629	Rendah
94	Kab. Tanjung Jabung Barat	1,130	Tinggi
95	Kab. Tanjung Jabung Timur	0,650	Rendah
96	Kab. Tebo	0,675	Rendah
97	Kota Jambi	1,155	Tinggi
98	Kota Sungai Penuh	0,427	Sangat Rendah
99	Kab. Lahat	1,237	Tinggi
100	Kab. Musi Banyuasin	2,998	Sangat Tinggi
101	Kab. Musi Rawas	1,188	Tinggi
102	Kab. Muara Enim	2,546	Sangat Tinggi
103	Kab. Ogan Komering Ilir	1,056	Sedang
104	Kab. Ogan Komering Ulu	0,983	Sedang
105	Kota Palembang	4,434	Sangat Tinggi
106	Kota Prabumulih	0,802	Sedang
107	Kota Pagar Alam	0,682	Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
108	Kota Lubuk Linggau	0,833	Sedang
109	Kab. Banyuasin	1,281	Tinggi
110	Kab. Ogan Ilir	0,779	Sedang
111	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1,027	Sedang
112	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	0,772	Sedang
113	Kab. Empat Lawang	0,730	Sedang
114	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1,798	Tinggi
115	Kab. Musi Rawas Utara	0,862	Sedang
116	Kab. Bengkulu Selatan	0,391	Sangat Rendah
117	Kab. Bengkulu Utara	0,617	Rendah
118	Kab. Rejang Lebong	0,529	Rendah
119	Kota Bengkulu	0,748	Sedang
120	Kab. Kaur	0,356	Sangat Rendah
121	Kab. Seluma	0,339	Sangat Rendah
122	Kab. Mukomuko	0,524	Rendah
123	Kab. Lebong	0,359	Sangat Rendah
124	Kab. Kepahiang	0,325	Sangat Rendah
125	Kab. Bengkulu Tengah	0,366	Sangat Rendah
126	Kab. Lampung Barat	0,557	Rendah
127	Kab. Lampung Selatan	1,071	Sedang
128	Kab. Lampung Tengah	1,223	Tinggi
129	Kab. Lampung Utara	0,981	Sedang
130	Kab. Lampung Timur	0,912	Sedang
131	Kab. Tanggamus	0,840	Sedang
132	Kab. Tulang Bawang	0,617	Rendah
133	Kab. Way Kanan	0,703	Rendah
134	Kota Bandar Lampung	2,275	Sangat Tinggi
135	Kota Metro	0,577	Rendah
136	Kab. Pesawaran	0,609	Rendah
137	Kab. Pringsewu	0,563	Rendah
138	Kab. Mesuji	0,491	Sangat Rendah
139	Kab. Tulang Bawang Barat	0,480	Sangat Rendah
140	Kab. Pesisir Barat	0,426	Sangat Rendah
141	Kab. Bandung	3,716	Sangat Tinggi
142	Kab. Bekasi	4,409	Sangat Tinggi
143	Kab. Bogor	5,563	Sangat Tinggi

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
144	Kab. Ciamis	0,928	Sedang
145	Kab. Cianjur	1,943	Tinggi
146	Kab. Cirebon	1,592	Tinggi
147	Kab. Garut	2,092	Sangat Tinggi
148	Kab. Indramayu	2,027	Sangat Tinggi
149	Kab. Karawang	2,880	Sangat Tinggi
150	Kab. Kuningan	1,056	Sedang
151	Kab. Majalengka	2,191	Sangat Tinggi
152	Kab. Purwakarta	1,214	Tinggi
153	Kab. Subang	1,986	Sangat Tinggi
154	Kab. Sukabumi	2,245	Sangat Tinggi
155	Kab. Sumedang	1,103	Tinggi
156	Kab. Tasikmalaya	1,266	Tinggi
157	Kota Bandung	5,486	Sangat Tinggi
158	Kota Bekasi	6,916	Sangat Tinggi
159	Kota Bogor	1,811	Tinggi
160	Kota Cirebon	1,141	Tinggi
161	Kota Depok	2,544	Sangat Tinggi
162	Kota Sukabumi	1,035	Sedang
163	Kota Tasikmalaya	1,157	Tinggi
164	Kota Cimahi	1,086	Sedang
165	Kota Banjar	0,430	Sangat Rendah
166	Kab. Bandung Barat	1,209	Tinggi
167	Kab. Pangandaran	0,719	Rendah
168	Kab. Banjarnegara	1,036	Sedang
169	Kab. Banyumas	2,026	Sangat Tinggi
170	Kab. Batang	0,950	Sedang
171	Kab. Blora	1,029	Sedang
172	Kab. Boyolali	1,279	Tinggi
173	Kab. Brebes	1,672	Tinggi
174	Kab. Cilacap	1,769	Tinggi
175	Kab. Demak	1,114	Tinggi
176	Kab. Grobogan	1,464	Tinggi
177	Kab. Jepara	1,360	Tinggi
178	Kab. Karanganyar	1,108	Tinggi
179	Kab. Kebumen	1,380	Tinggi

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
180	Kab. Kendal	1,192	Tinggi
181	Kab. Klaten	1,064	Sedang
182	Kab. Kudus	0,996	Sedang
183	Kab. Magelang	1,494	Tinggi
184	Kab. Pati	1,369	Tinggi
185	Kab. Pekalongan	1,168	Tinggi
186	Kab. Pemalang	1,333	Tinggi
187	Kab. Purbalingga	1,089	Tinggi
188	Kab. Purworejo	0,964	Sedang
189	Kab. Rembang	0,686	Rendah
190	Kab. Semarang	1,198	Tinggi
191	Kab. Sragen	0,799	Sedang
192	Kab. Sukoharjo	1,064	Sedang
193	Kab. Tegal	1,614	Tinggi
194	Kab. Temanggung	0,805	Sedang
195	Kab. Wonogiri	0,907	Sedang
196	Kab. Wonosobo	0,968	Sedang
197	Kota Magelang	0,757	Sedang
198	Kota Pekalongan	0,777	Sedang
199	Kota Salatiga	0,652	Rendah
200	Kota Semarang	4,573	Sangat Tinggi
201	Kota Surakarta	1,696	Tinggi
202	Kota Tegal	0,704	Rendah
203	Kab. Bantul	1,263	Tinggi
204	Kab. Gunung Kidul	1,100	Tinggi
205	Kab. Kulonprogo	1,003	Sedang
206	Kab. Sleman	1,668	Tinggi
207	Kota Yogyakarta	1,379	Tinggi
208	Kab. Bangkalan	0,763	Sedang
209	Kab. Banyuwangi	1,989	Sangat Tinggi
210	Kab. Blitar	1,320	Tinggi
211	Kab. Bojonegoro	5,307	Sangat Tinggi
212	Kab. Bondowoso	0,982	Sedang
213	Kab. Gresik	2,383	Sangat Tinggi
214	Kab. Jember	2,346	Sangat Tinggi
215	Kab. Jombang	1,327	Tinggi

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
216	Kab. Kediri	1,531	Tinggi
217	Kab. Lamongan	1,904	Tinggi
218	Kab. Lumajang	1,496	Tinggi
219	Kab. Madiun	1,145	Tinggi
220	Kab. Magetan	1,012	Sedang
221	Kab. Malang	2,030	Sangat Tinggi
222	Kab. Mojokerto	1,453	Tinggi
223	Kab. Nganjuk	1,205	Tinggi
224	Kab. Ngawi	1,047	Sedang
225	Kab. Pacitan	0,969	Sedang
226	Kab. Pamekasan	0,899	Sedang
227	Kab. Pasuruan	1,715	Tinggi
228	Kab. Ponorogo	1,258	Tinggi
229	Kab. Probolinggo	1,071	Sedang
230	Kab. Sampang	0,995	Sedang
231	Kab. Sidoarjo	3,257	Sangat Tinggi
232	Kab. Situbondo	0,740	Sedang
233	Kab. Sumenep	1,135	Tinggi
234	Kab. Trenggalek	1,047	Sedang
235	Kab. Tuban	1,345	Tinggi
236	Kab. Tulungagung	1,388	Tinggi
237	Kota Blitar	0,879	Sedang
238	Kota Kediri	0,816	Sedang
239	Kota Madiun	0,871	Sedang
240	Kota Malang	1,581	Tinggi
241	Kota Mojokerto	0,787	Sedang
242	Kota Pasuruan	0,623	Rendah
243	Kota Probolinggo	0,829	Sedang
244	Kota Surabaya	9,675	Sangat Tinggi
245	Kota Batu	0,674	Rendah
246	Kab. Bengkayang	0,442	Sangat Rendah
247	Kab. Landak	0,676	Rendah
248	Kab. Kapuas Hulu	0,884	Sedang
249	Kab. Ketapang	1,094	Tinggi
250	Kab. Mempawah	0,494	Sangat Rendah
251	Kab. Sambas	0,793	Sedang

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
252	Kab. Sanggau	0,778	Sedang
253	Kab. Sintang	0,269	Sangat Rendah
254	Kota Pontianak	1,538	Tinggi
255	Kota Singkawang	0,522	Rendah
256	Kab. Sekadau	0,611	Rendah
257	Kab. Melawi	0,536	Rendah
258	Kab. Kayong Utara	0,406	Sangat Rendah
259	Kab. Kubu Raya	0,742	Sedang
260	Kab. Barito Selatan	0,496	Sangat Rendah
261	Kab. Barito Utara	0,575	Rendah
262	Kab. Kapuas	1,186	Tinggi
263	Kab. Kotawaringin Barat	0,849	Sedang
264	Kab. Kotawaringin Timur	1,245	Tinggi
265	Kota Palangka Raya	0,603	Rendah
266	Kab. Katingan	0,664	Rendah
267	Kab. Seruyan	0,757	Sedang
268	Kab. Sukamara	0,458	Sangat Rendah
269	Kab. Lamandau	0,428	Sangat Rendah
270	Kab. Gunung Mas	0,523	Rendah
271	Kab. Pulang Pisau	0,566	Rendah
272	Kab. Murung Raya	0,604	Rendah
273	Kab. Barito Timur	0,456	Sangat Rendah
274	Kab. Banjar	0,876	Sedang
275	Kab. Barito Kuala	0,755	Sedang
276	Kab. Hulu Sungai Selatan	0,771	Sedang
277	Kab. Hulu Sungai Tengah	0,691	Rendah
278	Kab. Hulu Sungai Utara	0,799	Sedang
279	Kab. Kotabaru	1,020	Sedang
280	Kab. Tabalong	1,034	Sedang
281	Kab. Tanah Laut	0,933	Sedang
282	Kab. Tapin	0,970	Sedang
283	Kota Banjarbaru	0,942	Sedang
284	Kota Banjarmasin	1,241	Tinggi
285	Kab. Balangan	1,219	Tinggi
286	Kab. Tanah Bumbu	1,399	Tinggi
287	Kab. Berau	2,631	Sangat Tinggi

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
288	Kab. Kutai Kartanegara	3,683	Sangat Tinggi
289	Kab. Kutai Barat	1,595	Tinggi
290	Kab. Kutai Timur	3,404	Sangat Tinggi
291	Kab. Paser	1,902	Tinggi
292	Kota Balikpapan	2,376	Sangat Tinggi
293	Kota Bontang	1,386	Tinggi
294	Kota Samarinda	2,471	Sangat Tinggi
295	Kab. Penajam Paser Utara	1,089	Tinggi
296	Kab. Mahakam Ulu	1,065	Sedang
297	Kab. Bolaang Mongondow	0,464	Sangat Rendah
298	Kab. Minahasa	0,658	Rendah
299	Kab. Kepulauan Sangihe	0,399	Sangat Rendah
300	Kota Bitung	0,681	Rendah
301	Kota Manado	1,333	Tinggi
302	Kab. Kepulauan Talaud	0,434	Sangat Rendah
303	Kab. Minahasa Selatan	0,429	Sangat Rendah
304	Kota Tomohon	0,462	Sangat Rendah
305	Kab. Minahasa Utara	0,532	Rendah
306	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	0,385	Sangat Rendah
307	Kota Kotamobagu	0,437	Sangat Rendah
308	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0,362	Sangat Rendah
309	Kab. Minahasa Tenggara	0,331	Sangat Rendah
310	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0,415	Sangat Rendah
311	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0,368	Sangat Rendah
312	Kab. Banggai	1,025	Sedang
313	Kab. Banggai Kepulauan	0,355	Sangat Rendah
314	Kab. Buol	0,525	Rendah
315	Kab. Toli-Toli	0,539	Rendah
316	Kab. Donggala	0,513	Rendah
317	Kab. Morowali	0,830	Sedang
318	Kab. Poso	0,509	Rendah
319	Kota Palu	0,907	Sedang
320	Kab. Parigi Moutong	0,553	Rendah
321	Kab. Tojo Una-una	0,490	Sangat Rendah
322	Kab. Sigi	0,467	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
323	Kab. Banggai Laut	0,408	Sangat Rendah
324	Kab. Morowali Utara	0,572	Rendah
325	Kab. Bantaeng	0,612	Rendah
326	Kab. Barru	0,504	Sangat Rendah
327	Kab. Bone	1,001	Sedang
328	Kab. Bulukumba	0,811	Sedang
329	Kab. Enrekang	0,611	Rendah
330	Kab. Gowa	0,980	Sedang
331	Kab. Jeneponto	0,680	Rendah
332	Kab. Luwu	0,704	Rendah
333	Kab. Luwu Utara	0,864	Sedang
334	Kab. Maros	0,908	Sedang
335	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0,860	Sedang
336	Kota Palopo	0,661	Rendah
337	Kab. Luwu Timur	1,299	Tinggi
338	Kab. Pinrang	0,648	Rendah
339	Kab. Sinjai	0,551	Rendah
340	Kab. Kepulauan Selayar	0,506	Sangat Rendah
341	Kab. Sidenreng Rappang	0,674	Rendah
342	Kab. Soppeng	0,627	Rendah
343	Kab. Takalar	0,547	Rendah
344	Kab. Tana Toraja	0,755	Sedang
345	Kab. Wajo	0,849	Sedang
346	Kota Parepare	0,746	Sedang
347	Kota Makassar	4,236	Sangat Tinggi
348	Kab. Toraja Utara	0,696	Rendah
349	Kab. Buton	0,324	Sangat Rendah
350	Kab. Konawe	1,024	Sedang
351	Kab. Kolaka	0,774	Sedang
352	Kab. Muna	0,494	Sangat Rendah
353	Kota Kendari	1,227	Tinggi
354	Kota Bau-Bau	0,622	Rendah
355	Kab. Konawe Selatan	0,637	Rendah
356	Kab. Bombana	0,635	Rendah
357	Kab. Wakatobi	0,433	Sangat Rendah
358	Kab. Kolaka Utara	0,415	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
359	Kab. Konawe Utara	0,491	Sangat Rendah
360	Kab. Buton Utara	0,419	Sangat Rendah
361	Kab. Konawe Kepulauan	0,422	Sangat Rendah
362	Kab. Kolaka Timur	0,474	Sangat Rendah
363	Kab. Muna Barat	0,378	Sangat Rendah
364	Kab. Buton Tengah	0,369	Sangat Rendah
365	Kab. Buton Selatan	0,311	Sangat Rendah
366	Kab. Badung	8,422	Sangat Tinggi
367	Kab. Bangli	0,658	Rendah
368	Kab. Buleleng	1,789	Tinggi
369	Kab. Gianyar	1,655	Tinggi
370	Kab. Jembrana	0,772	Sedang
371	Kab. Karangasem	1,089	Tinggi
372	Kab. Klungkung	0,763	Sedang
373	Kab. Tabanan	1,237	Tinggi
374	Kota Denpasar	1,670	Tinggi
375	Kab. Bima	0,697	Rendah
376	Kab. Dompu	0,549	Rendah
377	Kab. Lombok Barat	1,077	Sedang
378	Kab. Lombok Tengah	0,905	Sedang
379	Kab. Lombok Timur	1,104	Tinggi
380	Kab. Sumbawa	0,752	Sedang
381	Kota Mataram	1,033	Sedang
382	Kota Bima	0,494	Sangat Rendah
383	Kab. Sumbawa Barat	0,632	Rendah
384	Kab. Lombok Utara	0,625	Rendah
385	Kab. Alor	0,478	Sangat Rendah
386	Kab. Belu	0,376	Sangat Rendah
387	Kab. Ende	0,394	Sangat Rendah
388	Kab. Flores Timur	0,446	Sangat Rendah
389	Kab. Kupang	0,487	Sangat Rendah
390	Kab. Lembata	0,341	Sangat Rendah
391	Kab. Manggarai	0,545	Rendah
392	Kab. Ngada	0,415	Sangat Rendah
393	Kab. Sikka	0,486	Sangat Rendah
394	Kab. Sumba Barat	0,424	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
395	Kab. Sumba Timur	0,541	Rendah
396	Kab. Timor Tengah Selatan	0,566	Rendah
397	Kab. Timor Tengah Utara	0,435	Sangat Rendah
398	Kota Kupang	0,755	Sedang
399	Kab. Rote Ndao	0,352	Sangat Rendah
400	Kab. Manggarai Barat	0,592	Rendah
401	Kab. Nagekeo	0,315	Sangat Rendah
402	Kab. Sumba Barat Daya	0,401	Sangat Rendah
403	Kab. Sumba Tengah	0,336	Sangat Rendah
404	Kab. Manggarai Timur	0,448	Sangat Rendah
405	Kab. Sabu Raijua	0,340	Sangat Rendah
406	Kab. Malaka	0,260	Sangat Rendah
407	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,533	Rendah
408	Kab. Maluku Tengah	0,770	Sedang
409	Kab. Maluku Tenggara	0,466	Sangat Rendah
410	Kab. Buru	0,512	Rendah
411	Kota Ambon	0,920	Sedang
412	Kab. Seram Bagian Barat	0,497	Sangat Rendah
413	Kab. Seram Bagian Timur	0,521	Rendah
414	Kab. Kepulauan Aru	0,848	Sedang
415	Kota Tual	0,443	Sangat Rendah
416	Kab. Maluku Barat Daya	0,638	Rendah
417	Kab. Buru Selatan	0,463	Sangat Rendah
418	Kab. Biak Numfor	0,616	Rendah
419	Kab. Jayapura	0,678	Rendah
420	Kab. Jayawijaya	0,775	Sedang
421	Kab. Merauke	1,351	Tinggi
422	Kab. Mimika	2,340	Sangat Tinggi
423	Kab. Nabire	0,705	Rendah
424	Kab. Paniai	0,498	Sangat Rendah
425	Kab. Puncak Jaya	0,866	Sedang
426	Kab. Kepulauan Yapen	0,393	Sangat Rendah
427	Kota Jayapura	0,720	Sedang
428	Kab. Sarmi	0,788	Sedang
429	Kab. Keerom	0,634	Rendah
430	Kab. Yahukimo	0,736	Sedang

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
431	Kab. Pegunungan Bintang	0,894	Sedang
432	Kab. Tolikara	0,819	Sedang
433	Kab. Boven Digoel	0,960	Sedang
434	Kab. Mappi	0,788	Sedang
435	Kab. Asmat	1,159	Tinggi
436	Kab. Waropen	0,623	Rendah
437	Kab. Supiori	0,525	Rendah
438	Kab. Mamberamo Raya	0,851	Sedang
439	Kab. Mamberamo Tengah	0,655	Rendah
440	Kab. Yalimo	0,834	Sedang
441	Kab. Lanny Jaya	0,742	Sedang
442	Kab. Nduga	0,761	Sedang
443	Kab. Dogiyai	0,446	Sangat Rendah
444	Kab. Puncak	0,733	Sedang
445	Kab. Intan Jaya	0,805	Sedang
446	Kab. Deiyai	0,479	Sangat Rendah
447	Kab. Halmahera Tengah	0,697	Rendah
448	Kota Ternate	0,708	Rendah
449	Kab. Halmahera Barat	0,433	Sangat Rendah
450	Kab. Halmahera Timur	0,499	Sangat Rendah
451	Kab. Halmahera Selatan	0,936	Sedang
452	Kab. Halmahera Utara	0,597	Rendah
453	Kab. Kepulauan Sula	0,461	Sangat Rendah
454	Kota Tidore Kepulauan	0,478	Sangat Rendah
455	Kab. Pulau Morotai	0,559	Rendah
456	Kab. Pulau Taliabu	0,528	Rendah
457	Kab. Lebak	1,428	Tinggi
458	Kab. Pandeglang	0,969	Sedang
459	Kab. Serang	1,705	Tinggi
460	Kab. Tangerang	4,318	Sangat Tinggi
461	Kota Cilegon	1,514	Tinggi
462	Kota Tangerang	4,223	Sangat Tinggi
463	Kota Serang	0,854	Sedang
464	Kota Tangerang Selatan	3,132	Sangat Tinggi
465	Kab. Bangka	0,602	Rendah
466	Kab. Belitung	0,613	Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
467	Kota Pangkal Pinang	0,507	Sangat Rendah
468	Kab. Bangka Selatan	0,533	Rendah
469	Kab. Bangka Tengah	0,462	Sangat Rendah
470	Kab. Bangka Barat	0,397	Sangat Rendah
471	Kab. Belitung Timur	0,467	Sangat Rendah
472	Kab. Boalemo	0,303	Sangat Rendah
473	Kab. Gorontalo	0,687	Rendah
474	Kota Gorontalo	0,758	Sedang
475	Kab. Pohuwato	0,534	Rendah
476	Kab. Bone Bolango	0,470	Sangat Rendah
477	Kab. Gorontalo Utara	0,368	Sangat Rendah
478	Kab. Natuna	0,824	Sedang
479	Kab. Kepulauan Anambas	0,528	Rendah
480	Kab. Karimun	0,720	Sedang
481	Kota Batam	2,273	Sangat Tinggi
482	Kota Tanjung Pinang	0,870	Sedang
483	Kab. Lingga	0,584	Rendah
484	Kab. Bintan	0,658	Rendah
485	Kab. Fakfak	0,644	Rendah
486	Kab. Manokwari	0,442	Sangat Rendah
487	Kab. Sorong	0,815	Sedang
488	Kota Sorong	0,601	Rendah
489	Kab. Raja Ampat	0,768	Sedang
490	Kab. Sorong Selatan	0,491	Sangat Rendah
491	Kab. Teluk Bintuni	1,885	Tinggi
492	Kab. Teluk Wondama	0,427	Sangat Rendah
493	Kab. Kaimana	0,608	Rendah
494	Kab. Maybrat	0,391	Sangat Rendah
495	Kab. Tambrauw	0,486	Sangat Rendah
496	Kab. Manokwari Selatan	0,308	Sangat Rendah
497	Kab. Pegunungan Arfak	0,406	Sangat Rendah
498	Kab. Majene	0,509	Rendah
499	Kab. Mamuju	0,617	Rendah
500	Kab. Polewali Mandar	0,680	Rendah
501	Kab. Mamasa	0,385	Sangat Rendah
502	Kab. Pasangkayu	0,504	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
503	Kab. Mamuju Tengah	0,384	Sangat Rendah
504	Kab. Bulungan	0,592	Rendah
505	Kab. Malinau	0,732	Sedang
506	Kab. Nunukan	0,532	Rendah
507	Kota Tarakan	0,871	Sedang
508	Kab. Tana Tidung	0,505	Sangat Rendah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001